



PRAKTIK GOOD GOVERNANCE ANTARA BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PT WIRABUMI ALAM SAKTI

(Studi Tentang Implementasi Program Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua)

Aulia Anisa¹, Dian Kagungan², Devi Yulianti³

¹Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Indonesia

Correspondence: E-mail: emailDPL@m.p

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *good governance* antara PT Wirabumi Alam Sakti dan BPJS Ketenagakerjaan dalam implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program tersebut di tingkat perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak manajemen perusahaan, tenaga kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT Wirabumi Alam Sakti belum sepenuhnya memenuhi prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas, partisipasi pekerja, dan kepastian hukum. Kendala implementasi meliputi keterbatasan pemahaman pekerja terhadap manfaat program serta ketidaklengkapan pendataan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program JKK, JKM, dan JHT guna meningkatkan perlindungan sosial tenaga kerja.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 15 Februari 2026

First Revised 18 Februari 2026

Accepted 19 Februari 2026

First Available online 21 Februari 2026

Publication Date 21 Februari 2026

Keyword:

Good Governance, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT)

1. INTRODUCTION

Pembangunan nasional Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial tenaga kerja melalui sistem perlindungan sosial yang memadai. Tenaga kerja memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi dan pembangunan, sehingga keberadaannya perlu dijamin melalui sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pemerintah menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Program tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja serta menjamin keberlangsungan pendapatan pekerja.

Dalam implementasinya, perusahaan sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tanpa membedakan status hubungan kerja. Namun demikian, pelaksanaan kewajiban tersebut masih menghadapi berbagai kendala di tingkat perusahaan, khususnya dalam hal pendataan tenaga kerja serta pemenuhan kewajiban pembayaran iuran.

Implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip *good governance* yang mencakup akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di tingkat perusahaan.

Penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada efektivitas program BPJS Ketenagakerjaan atau kepatuhan administratif perusahaan. Namun, penelitian yang mengkaji implementasi program BPJS Ketenagakerjaan dari perspektif *good governance* di sektor swasta masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *good governance* antara PT Wirabumi Alam Sakti dan BPJS Ketenagakerjaan dalam implementasi program JKK, JKJ, dan JHT, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program tersebut di tingkat perusahaan.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memahami implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di tingkat perusahaan dalam perspektif *good governance*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman fenomena implementasi kebijakan publik yang melibatkan interaksi antara perusahaan sebagai pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial.

Penelitian dilaksanakan di PT Wirabumi Alam Sakti yang berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan bahwa perusahaan tersebut merupakan industri padat karya yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang didasarkan pada keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di tingkat perusahaan. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pihak manajemen perusahaan, tenaga

kerja, serta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki peran dalam implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam mendaftarkan tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer melalui penelaahan dokumen kepesertaan tenaga kerja serta laporan pembayaran iuran BPJS.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum sebagai indikator dalam menilai implementasi program JKK, JKM, dan JHT di PT Wirabumi Alam Sakti.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pihak manajemen perusahaan, tenaga kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan guna memastikan konsistensi data terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat perusahaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Program JKK, JKM, dan JHT

Implementasi prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di PT Wirabumi Alam Sakti belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen perusahaan, diketahui bahwa tidak seluruh tenaga kerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pekerja harian lepas yang bekerja pada divisi operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendataan tenaga kerja sebagai peserta BPJS belum dilakukan secara menyeluruh.

Selain itu, pelaksanaan kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan juga masih menghadapi kendala administratif yang berkaitan dengan pendataan tenaga kerja yang bersifat fluktuatif. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam program JKK, JKM, dan JHT.

Dalam perspektif teori akuntabilitas, perusahaan sebagai pelaksana kebijakan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja sebagai kelompok sasaran kebijakan. Ketidakesuaian antara jumlah tenaga kerja yang terdaftar dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja menunjukkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT Wirabumi Alam Sakti belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan.

3.2 Implementasi Prinsip Partisipasi dalam Program JKK, JKM, dan JHT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pekerja dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT Wirabumi Alam Sakti masih tergolong rendah. Sebagian pekerja mengaku belum memperoleh informasi yang memadai mengenai manfaat program JKK, JKM, dan JHT serta hak dan kewajiban yang melekat pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pekerja mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan berdampak pada rendahnya pemahaman pekerja terhadap manfaat perlindungan sosial yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini menyebabkan pekerja tidak secara aktif terlibat dalam proses implementasi kebijakan, seperti dalam hal memastikan status kepesertaan mereka dalam program BPJS.

Dalam perspektif teori partisipasi, keterlibatan kelompok sasaran kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan publik merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Rendahnya tingkat pemahaman pekerja terhadap program BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat perusahaan belum sepenuhnya melibatkan pekerja sebagai kelompok sasaran kebijakan dalam pelaksanaan program JKK, JKM, dan JHT.

3.3 Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dalam Program JKK, JKM, dan JHT

Penerapan prinsip kepastian hukum dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT Wirabumi Alam Sakti juga belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan hasil studi dokumentasi, masih terdapat tenaga kerja yang belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan meskipun telah bekerja dalam jangka waktu tertentu di perusahaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 belum sepenuhnya dilaksanakan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban kepesertaan BPJS berpotensi mengurangi perlindungan sosial bagi pekerja dalam menghadapi risiko kerja.

Dalam perspektif teori *rule of law*, implementasi kebijakan publik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewajiban perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT Wirabumi Alam Sakti belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan.

3.4 Kendala Implementasi Program JKK, JKM, dan JHT

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT Wirabumi Alam Sakti, antara lain keterbatasan pemahaman pekerja terhadap manfaat program, serta ketidaklengkapan pendataan tenaga kerja yang bekerja secara tidak tetap. Selain itu, proses administrasi kepesertaan BPJS yang memerlukan pembaruan data secara berkala juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam mendaftarkan tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi program JKK, JKM, dan JHT di tingkat perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif, tetapi juga oleh faktor komunikasi antara perusahaan dan pekerja dalam pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT Wirabumi Alam Sakti dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) belum sepenuhnya memenuhi prinsip *good governance*. Hal ini terlihat dari penerapan prinsip akuntabilitas yang belum optimal, khususnya dalam pendataan tenaga kerja dan pemenuhan kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, partisipasi pekerja dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan masih tergolong rendah akibat keterbatasan pemahaman mengenai hak dan manfaat jaminan sosial yang diberikan melalui program JKK, JKJ, dan JHT. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat perusahaan belum sepenuhnya melibatkan pekerja sebagai kelompok sasaran kebijakan dalam pelaksanaan program.

Penerapan prinsip kepastian hukum juga belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan oleh masih adanya tenaga kerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan meskipun telah bekerja di perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban perusahaan dalam mendaftarkan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dilaksanakan.

5. REFERENCES

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anshori, F., & Putra, R. (2020). Evaluasi Kepatuhan Perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, 5(1), 77-91.
- Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Apriliani, I., & Bawamenewi, L. (2024). Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Perspektif Efektivitas. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(2), 45-56.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2025). *Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)*. Diakses dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jaminan-kehilangan-pekerjaan.html>
- Bovens, M. (2007). *Analysing and assessing accountability: A conceptual framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447-468.
- Bovens, M. (2010). *Two concepts of accountability: Accountability as a virtue and accountability as a mechanism*. *West European Politics*, 33(5), 946-967.
- Bovens, M. (2014). *Public accountability*. In M. Bovens, R. E. Goodin, & T. Schillemans (Eds.), *The Oxford Handbook of Public Accountability* (pp. 1-25). Oxford University Press
- Cahyono, A. (2019). Pelaksanaan Jaminan Hari Tua bagi Pekerja Formal di Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 4(2), 122-134.
- Damanik, R. (2021). *Good governance* dalam Implementasi BPJS Kesehatan di Daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 33-49.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Fath-Hiah, R., & Nafi'a, L. (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Formal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 88-102.
- Fauzi, R., & Lestari, M. (2020). Faktor Penghambat Implementasi BPJS Ketenagakerjaan di Perusahaan Swasta. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(2), 140-156.
- Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66-75.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Irawan, T. (2022). Akuntabilitas dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 14(2), 55-70.
- Jannah, M., & Firmansyah, D. (2021). Implementasi BPJS dalam Perspektif *Good governance*. *Jurnal Manajemen Publik*, 3(2), 98-112.
- Khairati, S., Angelia, D., & Kurniaty, A. (2023). Implementasi Pelayanan Lapak Asik dalam Klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Administrasi dan Pelayanan Publik*, 9(2), 65-79.
- Kurniawan, E. (2020). Efektivitas Program Jaminan Kecelakaan Kerja di Industri. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(3), 145-160.
- Mahardika, Y. (2022). *Governance dan Kepatuhan Perusahaan terhadap BPJS*. *Jurnal Studi Pembangunan*, 18(2), 72-86.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Midgley, J. (1997). *Social Welfare in Global Context*. California: Sage Publications.
- Pressman, J., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation*. Berkeley: University of California Press.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London: Routledge.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sulfiani, A. N. (2021). Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95-116.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tarigan, P. S., Sari, M. M., Purnama, I., & Sumarti, T. (2024). Korelasi Good Corporate Governance dengan Kinerja dan Pelayanan Publik. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(2), 10-24.
- Titmuss, R. (1974). *Social Policy: An Introduction*. New York: Pantheon Books.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process*. Illinois: Scott, Foresman.
- Zuhad, M. (2018). Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(3), 233-247.